



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD ALI
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN
3. NHK : 442431

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.600.000.000**

1. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 2.470 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 5.626 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **200.000.000**

1. MOTOR, HONDA (777)D1B02N13L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SPM R 2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **12.195.811**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.812.195.811

III. HUTANG

Rp. 530.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.282.195.811

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.